



## JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS

Halaman Jurnal: <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php>



### MENAKAR KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI FAKTOR-FAKTOR PENENTUNYA (Studi Empiris pada SKPD di Kota Semarang)

Intan Ayuningtyas<sup>a</sup>, Ardiani Ika Sulistyawati<sup>b</sup>, Arief Himmawan Dwi Nugroho<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi / Jurusan Akuntansi, [intan@gmail.com](mailto:intan@gmail.com), Universitas Semarang

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi / Jurusan Akuntansi, [ardiani@usm.ac.id](mailto:ardiani@usm.ac.id), Universitas Semarang

<sup>c</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis / Jurusan Akuntansi, [ariefhimmawan@edu.unisbank.ac.id](mailto:ariefhimmawan@edu.unisbank.ac.id), Universitas Stikubank Semarang

#### ABSTRACT

*This research aims to test and analyze the influence of internal control systems, information technology utilization, human resources quality, implementation good governance, and human resource capacity toward the quality of the financial information of local government. The sample in this research were employees of the finance department at SKPD in Semarang. Sampling techniques carried out by purposive sampling method that produces 124 samples to be processed. The analysis method used in this research is a quality test of data, classic assumptions test, hypothesis test and multiple linear regression analysis with SPSS program.*

*The results show that the partial implementation of information technology utilization and human resources quality have a positive effect on the quality of local government financial reporting information, while the use of internal control systems, implementation good governance, and human resource capacity does not have an effect on the quality of local government financial reporting information. While simultaneously the analyze the influence of internal control systems, information technology utilization, human resources quality, implementation good governance, and human resource capacity together affect the quality of the financial information of local government.*

**Keywords:** leadership, environment, stress, burden, performance

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, penerapan good governance, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan pada SKPD Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang menghasilkan 124 sampel untuk diolah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penggunaan sistem pengendalian internal, penerapan good governance, dan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara simultan analisis pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, penerapan good governance, dan kapasitas sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** kepemimpinan, lingkungan, stres, beban, kinerja

## 1. PENDAHULUAN

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Manuppan dkk, 2015).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan adan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mustikawati, 2013). Perkembangan akuntansi Sektor Publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah (Azlim dkk, 2012).

Kawedar (2009) dalam Rama dan Putra (2014) menyatakan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Surastiani dan Handayani (2015) menyatakan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK telah melakukan audit atas LKPD selama 5 tahun, dari tahun 2009-2013 atas 456 LKPD Tahun 2013, hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK meunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal.

BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan kualitas informasi pelaporan, terdiri atas pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai (Surastiani dan Handayani, 2015). Menurut Surastiani dan Handayani (2015), informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai, oleh karena itu informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu : 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, berarti pemerintah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, jika tidak memenuhi maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I tahun 2013 opini BPK untuk LKPD Kabupaten Gianyar tahun 2012 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang tetap sama sejak tahun 2008. PAD Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 30 Milyar lebih. Akan tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh kabupaten Gianyar sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2012. Hal ini berarti beberapa LKPD Kabupaten Gianyar masih mengandung kelemahan-kelemahan dan belum mampu memenuhi kualitas informasi yang baik. Kelemahan-kelemahan tersebut salah satunya mungkin dipengaruhi dari kapasitas sumber daya manusia,

pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum sepenuhnya diterapkan pada SKPD di Kabupaten Gianyar (Rama dan Putra, 2014).

Menurut penelitian Indriasari (2011) dalam Yendrawati (2013), kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan kondisi kapasitas sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang belum mendukung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian intern menunjukkan berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini juga mendukung berbagai literatur yang menjelaskan tentang tujuan dari pengendalian intern yaitu memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pegecualian (WDP) untuk kelima Kabupaten/Kota ( Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal). Permasalahan yang menjadi pengecualian pada Kabupaten Kendal antara lain: laporan barang milik daerah tidak mempunyai informasi aset tetap yang konsisten, tanah untuk jalan belum disajikan sesuai kondisi sebenarnya, tanah untuk irigasi belum disajikan, mutasi peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan didasarkan pada BAST yang tidak valid. Permasalahan yang menjadi pengecualian pada Kota Semarang antara lain: nilai aset tetap tanah dalam neraca belum termasuk tanah dibawah irigasi, tanah ruas milik jalan (rumija), dan tanah seluas 55 hektar, nilai aset tetap jalan irigasi dan jaringan belum termasuk irigasi primer sepanjang 2.400 m dan saluran sekunder sepanjang 149.057 m, serta terdapat perbedaan jumlah ruas tanah untuk jalan berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 621/434/2016 dengan yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) D (Badan Pemeriksaan Keuangan, 2015).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa informasi laporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu : 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat Dibandingkan dan 4) Dapat Dipahami. Mengingat nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal penting yang terkait dengan pengambilan keputusan dari berbagai pihak, maka peneliti tertarik untuk meneliti raktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi system informasi, kualitas sumber daya manusia, penerapan *good governance* dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et all (2005) dalam penelitian Herawati (2014) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas dapat diaudit, (Herawati 2014).

Penelitian yang dilakukan Surastiani dan Handayani (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama dan Putra (2014) yang menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta kelemahan stuktur pengendalian intern pada temuan kasus yang dilakukan oleh BPK mengalami penurunan atau temuan kelemahan berkurang maka akan mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia (Fransiska dkk, 2016).

H<sub>1</sub>: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan

## **2.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Rama dan Putra (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan. Institusi-institusi pemerintahan saat ini, harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi (Andriani 2010 dalam Rama dan Putra 2014).

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multi-processing* (Indriasari 2008, dalam Rama dan Putra, 2014). Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Menurut penelitian Maulidia dkk (2014) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah .

H<sub>2</sub>: Pemanfaatan teknologi sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

## **2.3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Amran (2009) dalam Rama dan Putra (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi. Hal ini senada dengan penelitian Surastiani dan Handayani (2015) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan. Sumber daya manusia yang memahahi dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan dibutuhkan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan daerah yang berkompentensi. Penelitian Nurillah (2014) dalam Surastiani dan Handayani (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Mailani Fadilah (2013) dalam Andini dan Yusrawati (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Firdaus dkk (2015) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yang berarti bahwa dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

H<sub>3</sub>: Kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan

## **2.4. Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Pemerintahan yang baik yang sering disebut dengan *good governance* merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan daerah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Menurut penelitian Azlim dkk (2012) menyatakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Batubara (2006) dalam Azlim dkk (2012), yang menyebutkan bahwa penerapan *good governance* merupakan tuntutan dari pembaharuan system keuangan. Tujuannya adalah agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dan dipertanggung jawabkan dalam pelaporan keuangan dengan berdasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktarina dkk (2016) bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Semarang. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Manuppan dkk (2015) bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin berjalan penerapan *good governance* maka kualitas informasi laporan keuangan tersebut akan semakin baik.

H<sub>4</sub>: Penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan

## 2.5. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Dalam penelitian Yendrawati (2013) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus kapasitas sumber daya manusia, maka kualitas informasi laporan keuangan juga semakin bagus. Menilai kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* sumber daya tersebut. Tanggung jawab sumber daya manusia dapat dilihat dalam diskripsi jabatan. Diskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pemisahan tugas yang dilakukan manajemen dapat mengurangi terjadinya kecurangan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain walaupun yang bekerja dalam satu bidang

Indriasari (2011) dalam Yendrawati (2013) membuktikan bukti empiris tentang kapasitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Modo dkk (2016) adalah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

H<sub>5</sub>: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer, yang bersumber dari jawaban responden dari daftar pertanyaan yang diberikan.

### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah pegawai Pemerintah Daerah SKPD Kota Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah staf bagian akuntansi atau keuangan pada SKPD Kota Semarang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa SKPD yang melakukan konsolidasi laporan keuangan semua SKPD dalam lingkup kota Semarang dan menghasilkan output akhir berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai SKPD yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan
2. Pegawai sebagai pegawai tetap dengan pengalaman minimal 2 tahun

Pengambilan sampel dilakukan pada Pemerintah Kota Semarang berdasarkan subjektivitas peneliti dengan alasan non random, karena keterjangkauan lokasi penelitian dan berbagai opini di lembaga-lembaga pemerintahan Kota Semarang. Penentuan jumlah sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2006). Dalam penelitian ini karena jumlah populasinya sedikit (terbatas) sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sampel, sehingga peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi atau disebut dengan sensus yaitu SKPD di Kota Semarang sebanyak 181 Responden.

### 3.3. Uji Instrumen

Uji instrumen mencakup dua uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Instrumen dikatakan valid jika seluruh instrumen dari kuesioner yang diujikan sesuai. Item kuesioner valid jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Adapun instrumen dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60.

### 3.4. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Untuk uji normalitas menggunakan metode uji Kolmogorov Smirnov yaitu dimana data terdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Uji multikolinieritas menggunakan kriteria jika VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas menggunakan

uji glejser, yaitu jika variabel independen signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian.

### 3.5. Regresi Linier Berganda

Persamaan regresinya adalah:  $Y = \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \varepsilon_1$

Keterangan:

Y = Kualitas Informasi Laporan Keuangan

X1 = Sistem Pengendalian Intern

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X3 = Kualitas Sumber Daya Manusia

X4 = Penerapan *Good Governance*

X5 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

$\varepsilon_1$  = Error

### 3.6. Uji t (Parsial)

Uji ini digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya dengan syarat apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.7. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Analisis Adjust R Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Uji Instrumen

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung (nilai *Correlated Item – Total Correlation* pada *output Cronbach Alpha*) dengan nilai r-tabel untuk *degree of freedom (df) = n-2* (n adalah jumlah sampel) (Ghozali, 2011). Dengan jumlah sampel (n) adalah 124 dan tingkat signifikansi 0,05 maka nilai r-tabel pada penelitian ini adalah:  $r(0,05;122) = 0,176$ . Masing-masing indikator dari masing-masing variabel mempunyai nilai r hitung lebih dari 0,176 sehingga data yang digunakan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Alpha Cronbach (α)*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha > 0,70* (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2011). Perhitungan nilai koefisien reliabilitas untuk instrumen penelitian yang digunakan diperoleh dari pengujian reliabilitas variabel penelitian, diperoleh nilai koefisien reliabilitas  $> 0,70$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tersebut dinyatakan reliabel.

### 4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian normalitas menunjukkan nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* sebesar  $0,200 > 0,05$ , yang artinya nilai residuals terdistribusi normal. Adapun hasil uji multikolonieritas, menunjukkan bahwa semua nilai VIF dari variabel bebas memiliki nilai (antara 0,441 sampai dengan 0,919)  $< 10$ , yang artinya antar variabel bebas tidak terjadi korelasi dalam penelitian. Demikian juga, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan semua variabel bebas mempunyai nilai signifikansi (antara 0,100 sampai dengan 0,980)  $> 0,05$ , yang berarti tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari pengamatan satu dengan pengamatan lainnya.

### 4.3. Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 1** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,847	2,030		4,359	,000
Sistem Pengendalian Intern	,210	,140	,169	1,496	,137
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,303	,149	,238	2,034	,044
Kualitas Sumber Daya Manusia	,329	,107	,326	3,086	,003
Penerapan Good Governance	,077	,045	,131	1,717	,089
Kapasitas Sumber Daya Manusia	,002	,069	,003	,027	,979

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat dalam persamaan berikut :

$$Y = 0,169X_1 + 0,238X_2 + 0,326X_3 + 0,131X_4 + 0,003X_5 + \dots \dots \dots (1)$$

1. Hasil  $\beta_1$  menunjukkan hasil positif yang berarti apabila sistem pengendalian intern semakin baik maka kualitas informasi laporan keuangan akan semakin meningkat.
2. Hasil  $\beta_2$  menunjukkan hasil positif yang berarti apabila pemanfaatan teknologi informasi semakin meningkat maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin meningkat.
3. Hasil  $\beta_3$  menunjukkan hasil positif yang berarti apabila kualitas sumber daya manusia semakin baik maka kualitas informasi laporan keuangan akan semakin meningkat.
4. Hasil  $\beta_4$  menunjukkan hasil positif yang berarti apabila penerapan good governance semakin baik maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin meningkat.
5. Hasil  $\beta_5$  menunjukkan hasil positif yang berarti apabila kapasitas sumber daya manusia semakin baik maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin meningkat.

### 4.4. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Hipotesis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Nilai signifikansi sebesar  $0,137 < 0,05$ , dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak, yaitu sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

2. Uji Hipotesis Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Nilai signifikansi sebesar  $0,0044 < 0,05$  dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima, yaitu pemanfaatan teknologi informasi lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

3. Uji Hipotesis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$  dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima, yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

4. Uji Hipotesis Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Nilai signifikansi hasil sebesar  $0,089 > 0,05$  dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 4 dalam penelitian ini ditolak, yaitu penerapan good governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

5. Uji Hipotesis Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Nilai signifikansi hasil sebesar  $0,979 > 0,05$  dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 5 dalam penelitian ini ditolak, yaitu kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

#### 4.5. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,574 yang artinya 57,4 persen variabel kualitas informasi laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, penerapan *good governance* dan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan sisanya sebesar 42,6 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

#### 4.5. Pembahasan

##### 4.5.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengujian hipotesis 1 membuktikan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Yang dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern di SKPD Kota Semarang yang telah ditetapkan sudah cukup bagus, tetapi belum diterapkan secara efektif atau menyeluruh yang menyebabkan kurang tepat dalam pembuatan informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat bahwa indikator pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai masih diberikan nilai netral dari SKPD Kota Semarang, hal ini dapat disimpulkan bahwa pegawai SKPD dalam melakukan pembukuan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) masih minim akan pengendalian intern dari pihak manajemen atau belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 4.5.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengujian hipotesis 2 membuktikan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Yang berarti bahwa SKPD di Kota Semarang sudah memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan. Sejalan perkembangan zaman, yang menggunakan teknologi berbasis komputerisasi dan internet, maka seluruh aktivitas di dalam instansi pemerintahan termasuk laporan keuangan menggunakan komputer dan jaringan internet.

##### 4.5.3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengujian hipotesis 3 membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam bidang akuntansi lebih khususnya akuntansi pemerintahan, keuangan pemerintahan, dan organisasi pemerintahan serta mempunyai pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas informasi yang tepat, baik, dan berkompetensi. Kemampuan yang harus dimiliki pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu diasah. Hal ini dapat dilihat bahwa perlunya pelatihan-pelatihan untuk membantu pengembangan keahlian yang telah dimiliki yaitu dengan diadakannya sosialisasi atau diklat jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah.

##### 4.5.4. Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengujian hipotesis 4 membuktikan bahwa penerapan *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa SKPD di Kota Semarang belum sepenuhnya menerapkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pemerintahan yang baik harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Kegiatan operasional yang efisien apabila suatu hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang serendah-rendahnya. Yang dapat diartikan bahwa efisiensi kinerja dapat dicapai dengan prinsip ekonomis, yaitu dengan menggunakan sumber daya yang serendah-rendahnya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang ada.

##### 4.5.5. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengujian hipotesis 5 membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Kapasitas sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Untuk menghasilkan keluaran akan kualitas informasi laporan keuangan di sini tidak dipengaruhi oleh kapasitas atau jumlah pegawai di SKPD. Hal ini untuk menghindari kekeliruan-kekeliruan atas laporan keuangan yang dipublikasikan. Karena dengan banyaknya kapasitas sumber daya manusia hasil

(*outcomes*) yang dihasilkan lebih efisien akan waktu, namun mempunyai peluang besar terjadi ketidaktepatan informasi laporan keuangan yang dikarenakan diolah oleh pegawai dengan kapasitas yang tinggi. Selain itu SDM di instansi pemerintahan atau SKPD bagian keuangan biasanya adalah pegawai biasa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau mutasi (dengan pelatihan khusus) pegawai dari bagian umum atau lainnya yang mana tidak membutuhkan pendidikan khusus akuntansi. Maka dari itu kapasitas tidak mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
2. Sistem pengendalian intern, penerapan *good governance* dan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

### 5.2. Saran

Dari hasil penelitian disarankan kepada pimpinan di setiap SKPD Kota Semarang agar bisa memaksimalkan sistem pengendalian intern secara efektif, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan *good governance*, dan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas dengan sering memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi. SKPD Kota Semarang juga perlu mengimplementasikan SAP secara tepat dan lengkap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga opini BPK untuk Kota Semarang yang Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bisa menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditahun-tahun berikutnya.

### 5.3. Keterbatasan Penelitian

1. Sampel dalam penelitian ini terbatas, dikarenakan pegawai SKPD Kota Semarang terlalu sibuk dalam tugas di dalam instansi pemerintahan, sehingga penyebaran kuesioner belum maksimal.
2. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang bersifat tertutup, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakjujuran dalam menjawab pertanyaan.
3. Untuk indikator sistem pengendalian intern belum memperhatikan atau belum sesuai dengan peraturan pemerintahan.

### 5.4. Agenda Penelitian Selanjutnya

1. Sebaiknya peneliti yang akan datang lebih memperbanyak dan memperluas objek sampel. Sehingga peneliti dapat memperkirakan jumlah kuesioner yang disebar dapat kembali dan dapat diolah lebih dari 68,5 persen dari total kuesioner yang disebar.
2. Dalam penyebaran kuesioner diharapkan responden benar-benar 100 persen yang bekerja pada bagian keuangan yang berlatar pendidikan akuntansi atau minimal Ekonomi, sehingga dapat memahami kuesioner yang diberikan.
3. Indikator sistem pengendalian intern seharusnya memperhatikan atau sesuai dengan PP No.60 tahun 2008 dan sesuai dengan SAP PP No. 71 tahun 2010.

## DAFTAR PUSTAKA

Andini, D & Yusrawati (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I* Vol. 24 (1).

Azlim, dkk (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akutansi Issn, 2302, 0164*.

- Fikri, M. A., & Biana, A. I. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD Di Pemprov. Ntb). *Simposium Nasional Akuntansi 18, Universitas Sumatra Utara, Medan*.
- Firdaus, dkk (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 4(1)*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, D. (2012). Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol, 12, 16*.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Star-Study & Accounting Research, 11(1)*.
- Ikhsan, A., & Ishak, M. (2005). Akuntansi Keperilakuan. *Jakarta: salemba empat*.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi. *Yogyakarta: BPFE*.
- Kurniawan, I. S. (2016). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Kinerja : Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume 13, (1), 1907-3011*
- Manuppan dkk (2015). Pengaruh *Good Governance*, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai).
- Maulidia, I., Effendi, R., & Dhia, C (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dispenda Kota Palembang.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill", 7(2)*.
- Mustikawati, D. (2013). Pengaruh Etika Profesional, Akuntabilitas, Kompetensi Dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 2(12)*.
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). *Journal Of Accounting, 2(2)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

- Ponamon, I. F. (2013). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 9(2).
- Rama Mahaputra, I., & Putra, I. W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2), 230-244.
- Rosalin, F., & Kawedar, W. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Siaran Pers BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. "Penyerahan LHP Atas LKPD TA 2015 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah: Lima Kabupaten/Kota Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian". <http://semarang.bpk.go.id/?p=7157> di Download pada 5 Agustus 2017.
- Sugiyono, D. R. (2006). Metode Penelitian Administrasi. Cetakan ke-14. *Alfa Beta, Bandung*.
- Suparman, W. E., Herawati, N. T., AK, S., Edy Sujana, S. E., & Msi, A. K. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 2(1).
- Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2).
- Syamsir, T. (2014). Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Dan Budaya Organisasi Daerah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 17(2), 166-175.
- Yusniyar, D., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 5(2).
- Yeny, Y., Karamoy, H., & Poputra, A. T. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).